

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu dari beberapa sektor yang dimiliki suatu daerah guna meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Pariwisata memiliki potensi yang besar dan sangat berpengaruh sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, dan melestarikan budaya lokal khas daerah tersebut. Pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.¹ Peraturan tersebut memberikan landasan hukum bagi pengembangan pariwisata di seluruh wilayah, termasuk desa-desa yang memiliki potensi wisata. Desa Taba Lubuk Puding, yang terletak di Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma, memiliki berbagai potensi wisata yang belum mengalami perkembangan secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, peran sektor pariwisata dalam mendorong pengembangan industri pariwisata baru yang

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

berkelanjutan menjadi penting. Dinas Pariwisata akan bekerja keras untuk menciptakan destinasi wisata yang menarik dan kompetitif melalui publisitas dan promosi, pembangunan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, kerjasama dengan masyarakat lokal dan aspek lainnya.

Namun peran sektor pariwisata tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan yang dihadapi seperti kurangnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pariwisata bagi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, perlu dianalisis bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan wisata baru di Desa Puding Tabalu dan bagaimana kepatuhannya terhadap ketentuan UU No. 10 Tahun 2009.

Pengembangan kawasan pariwisata pada dasarnya adalah pembangunan masyarakat dan wilayah yang berbasis pada kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tetap mempertahankan ciri-ciri budaya dan tradisi setempat, meningkatkan pendapatan perekonomian, dan sekaligus mendistribusikannya secara merata kepada penduduk setempat. Objek dan daya tarik wisata adalah bentuk dan/atau kegiatan serta fasilitas terkait yang menarik wisatawan atau pengunjung ke suatu kawasan atau tempat menarik tertentu. Atraksi yang belum berkembang atau

belum berkembang hanyalah sumber daya potensial dan tidak dapat disebut atraksi wisata sampai terjadi pengembangan tertentu. Misalnya saja penyediaan aksesibilitas atau fasilitas. Oleh karena itu, suatu atraksi dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata.²

Menurut Alim Sumarno (2012), pengembangan berarti proses mengubah atau mendeskripsikan spesifikasi desain menjadi fitur fisik. Pengembangan secara khusus mengacu pada proses menghasilkan materi pembelajaran, dan pengembangan berfokus tidak hanya pada analisis kebutuhan tetapi juga pada isu-isu luas analisis end-to-end, seperti analisis kontekstual. Tujuan pengembangan adalah menghasilkan produk berdasarkan hasil uji lapangan. Menurut Andi Mappi Sammeng (2001), “Kata pembangunan nampaknya mempunyai arti dan penafsiran yang berbeda-beda, tidak hanya antar negara tetapi juga antar individu. Pembangunan mengandung arti suatu proses evolusi yang berkonotasi positif, atau paling tidak berarti tidak akan kemana-mana. Perbedaan ini muncul karena kata “perkembangan” dapat dikaitkan dengan dua hal, yaitu proses dan berkembangnya sesuatu. Misalnya saja penggunaan kata “pembangunan” dalam proses kegiatan

² eJournal Universitas Mulawarman, *Pemerintahan Integratif*, Volume 4, Nomor 1, 2016: 69.

pengembangan pariwisata di Bali yang terjadi dengan pesat. Lebih lanjut, contoh penggunaan kata pembangunan dalam arti hierarki adalah pembangunan pariwisata di Bali sudah mencapai tahap ketiga.³

Kata Siyasah berasal dari istilah “sasa” yang berarti memimpin, mengatur, dan memberikan pelatihan. Istilah “saasa al qouma” merujuk pada tindakan pemimpin dalam mengatur dan melatih suatu komunitas. Siyasah diartikan sebagai manajemen administrasi. Menurut Kamus Al-Munjid dan Lisan Al-Arab, istilah ini menggambarkan aktivitas mengelola, mengatur, dan memerintah. Dengan demikian, secara etimologis, Siyasah mencakup arti mengatur, mengelola, memimpin, merancang kebijakan, pemerintahan, dan politik. Dalam konteks Lisan Al-Arab, Siyasah diartikan sebagai pengaturan atau kepemimpinan yang mengarah pada kebaikan bersama. Apabila Siyasah dimaksudkan sebagai pengelolaan urusan masyarakat, maka Islam menekankan pentingnya hal tersebut. Islam bahkan sangat mengkritik individu yang tidak peduli dengan kepentingan umum. Namun, jika Siyasah dilihat sebagai fokus pada kekuasaan, Islam menganggap kekuasaan

³ eJournal Universitas Mulawarman, *Pemerintahan Integratif*, Volume 4, Nomor 1, 2016: h. 70.

hanyalah alat untuk menyempurnakan pengabdian kepada Allah.⁴

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bagian dalam fiqh siyasah yang mengkaji isu-isu mengenai hal legislasi negara. Di dalam konteks ini, juga dibahas mengenai berbagai konsep konstitusi, termasuk dasar hukum negara dan latar belakang kelahiran undang-undang di suatu negara. Proses pembuatan undang-undang, serta institusi demokrasi dan syura yang merupakan dasar penting dalam perundang-undangan juga termasuk hal yang dibahas dalam siyasah dusturiyah. Selain itu, analisis ini turut mempelajari prinsip negara hukum dalam siyasah serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk hak-hak yang harus dilindungi bagi warga negara.

Siyasah dusturiyah merupakan aspek dari fiqh siyasah yang mengkaji isu-isu terkait regulasi negara. Dalam hal ini, dibahas berbagai konsep seperti konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah pembentukan regulasi di suatu negara), proses legislasi (metodologi penyusunan undang-undang), serta lembaga demokrasi dan *syura* yang berperan sebagai

⁴ Syarial Dedi, et.al., *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN CURUP, 2019), h. 6-7.

pihak utama dalam regulasi tersebut.⁵ Tujuan utama penetapan peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan individu.

Isu yang muncul dalam fiqh siyasah dusturiyah berkaitan dengan interaksi antara pemimpin dan rakyat, serta institusi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah umumnya hanya membahas pengaturan dan peraturan yang relevan dengan aspek kenegaraan, ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip agama dan sebagai wujud dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.⁶

Masalah *fiqh siyasah dusturiyah* pada umumnya berkaitan erat dengan dua hal mendasar: yang *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tetap konsisten meskipun masyarakat mengalami perubahan. Sebab, dalil-dalil *kulliy* ini berperan sebagai elemen pendorong dalam memodernisasi masyarakat. Yang *kedua*, peraturan-

⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).

⁶ H.A.Djazuli, *IFiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

peraturan yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semuanya berubah. Dari perspektif lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dikategorikan menjadi:⁷ Bidang *siyasah tasyri'iyah*, yang meliputi isu-isu *ahl al hall wa al 'aqd*, perwakilan masyarakat. Interaksi antara muslim dan non-muslim dalam suatu negara, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah lainnya.

Bidang *siyasah tanfidhiyah* mencakup isu-isu imamah, *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan sebagainya; Bidang *siyasah qadha'iyah*, yang membahas masalah-masalah peradilan; Bidang *siyasah idariyah*, yang mencakup isu-isu administratif dan kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, negara memiliki tugas-tugas penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan wisata baru di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten

⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 48.

Seluma sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan?

2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan wisata baru di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan wisata baru yang ada di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Untuk menganalisis peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan wisata baru yang ada di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata terhadap Pengembangan Wisata Baru di

Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah terkhususnya Program Studi Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan di kalangan mahasiswa bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata terhadap Pengembangan Wisata Baru di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata terhadap Pengembangan Wisata Baru di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma menurut Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi untuk pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan perannya dalam mengembangkan wisata baru yang ada di daerah sekitarnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai sumbangsih pikiran dalam pelaksanaan penelitian sejenis serta sebagai bacaan baru bagi peneliti.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Baru di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Untuk dapat memperjelas dan mempertegas bahwasanya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka sekiranya perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang

penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian-penelitian terdahulu akan ditulis dibawah ini.

1. Fania Sopia (2023). Penelitian skripsi dengan judul *“Peran Dinas Pariwisata dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata di Pantai Pane pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 menurut Perspektif Fiqh Siyasah”*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana Dinas Pariwisata menjalankan perannya dalam meningkatkan fasilitas dari wilayah lingkup kerjanya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa Dinas Pariwisata masih belum optimal dalam meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam wisata tersebut. Contohnya tempat sampah dan toilet umum.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sudut pandang yang dibahas sama, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan peran dari Dinas Pariwisata terhadap wisata-wisata yang ada di sekitarnya menurut *fiqh siyasah*(*siyasah dusturiyah*).

⁸ Fania Sopia, *“Peran Dinas Pariwisata dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi wisata di Pantai Pane pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 menurut Perspektif Fiqh Siyasah”* Skripsi S-1, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023)

2. Kholidah (2022). Penelitian skripsi dengan judul *“Peranan Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Mandailing Natal”*. Dalam penelitian ini membahas tentang Peranan yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwasanya Dinas Pariwisata telah berupaya untuk meningkatkan pengembangan objek wisata yang ada namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi agar potensi wisata di Kabupaten Mandailing Natal dapat dimaksimalkan.⁹ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti bagaimana Dinas Pariwisata memaksimalkan perannya dalam mengembangkan wisata-wisata yang ada di daerah lingkup kerjanya.
3. Andi Muhammad Roni (2020). Penelitian skripsi dengan judul *“Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Bahari di Kabupaten Bone”*. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Dinas Pariwisata terkait yang ada di Kabupaten Bone turut

⁹ Kholidah, *“Peranan Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Mandailing Natal”*, Skripsi S-1, (Medan: Universitas Medan Area, 2022)

serta dalam mengembangkan wisata bahari seperti pembangunan sarana dan prasarana, pemasaran wisata, dan juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata tersebut telah berperan aktif dalam pengembangan wisata bahari melalui kebijakan, program, dan pemasaran, meskipun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik secara positif maupun negatif.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tentang apakah Dinas Pariwisata ikut serta dan berperan aktif dalam pengembangan wisata di suatu daerah yang masih lingkup kerjanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada daerah Wisata Ikan Larangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan

¹⁰ Andi Muhammad Roni, *“Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Bahari di Kabupaten Bone”*, Skripsi S-1, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020)

berasal dari data pustaka, wawancara, catatan lapangan, dll.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena atau masalah yang sedang diteliti, dengan cara menggali data yang lebih bersifat deskriptif dan naratif. Dengan pendekatan kualitatif memungkinkan penulis menggali secara mendalam bagaimana Dinas Pariwisata menjalankan perannya dalam mengembangkan suatu wisata baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 04 Tahun 2017, seperti Pembangunan sarana dan

prasarana, pemasaran wisata dan juga turut serta dalam segala bentuk proses pengembangan wisata baru tersebut.

2) Yuridis Empiris

Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik, dengan mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan. Pendekatan yuridis empiris sangat relevan karena fokusnya pada penerapan hukum dalam konteks sosial. Dalam hal ini, peneliti dapat menilai bagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 04 Tahun 2017 diimplementasikan di lapangan, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga terkait dalam mengembangkan objek wisata tersebut. Pendekatan ini juga memberikan ruang untuk mengeksplorasi perspektif masyarakat terhadap pengembangan pariwisata yang ada di daerah sekitarnya.

3) Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan perundang-

undangan yang relevan secara tekstual dan konseptual, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 04 Tahun 2017. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji asas-asas hukum, kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pengembangan pariwisata sebagaimana diatur dalam norma hukum positif. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menguji kesesuaian implementasi kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terhadap kerangka hukum formal yang berlaku.

4) Pendekatan *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Konstitusional Islam)

Sebagai bagian integral dari perspektif penelitian, pendekatan *siyasah dusturiyyah* digunakan untuk menganalisis peran lembaga pemerintahan (dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga) dari sudut pandang tata kelola negara dalam Islam yang berlandaskan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum), *'adl* (keadilan), dan *amanah* (tanggung jawab).

Dalam perspektif *siyasaḥ dusturiyyah*, pengembangan wisata bukan semata-mata urusan ekonomi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam memelihara kesejahteraan rakyat (*ri'āyah al-shu'ūn al-ummah*) sebagaimana ditegaskan dalam konsep kepemimpinan Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai apakah kebijakan dan tindakan Dinas Pariwisata telah selaras dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap warisan lokal termasuk 'Ikan Larangan' yang memiliki akar budaya dan spiritual dalam kerangka penyelenggaraan negara menurut ajaran Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 1-2 bulan dan dilakukan di Wisata Ikan Larangan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan persoalan yang terjadi di Lokasi wisata tersebut bahwasanya belum adanya peraturan yang ditetapkan untuk mengatur pengelolaan

Wisata Ikan Larangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata yang tergolong baru ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2017.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini subjek yang dipilih untuk memberikan informasi terkait Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Baru di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah sebagai berikut;

- a. Pemerintah Desa Taba Lubuk Puding
- b. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seluma
- c. POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Taba Lubuk Puding
- d. Masyarakat Desa Taba Lubuk Puding

Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pengelolaan wisata tersebut dan Dinas Pariwisata berkewajiban untuk memonitoring dan mengevaluasi bagaimana perkembangan wisata tersebut.¹¹ Informasi yang diberikan dari informan-informan tersebut bisa memberikan wawasan tentang peraturan yang ada, kebijakan yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan wisata baru tersebut.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹² Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

¹¹ Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seluma.

¹² Marzuki, P. M. *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181.

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Baru di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus: Wisata Ikan Larangan).

2) Data Sekunder

Dalam Penelitian ini Bahan hukum yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi bahan hukum yang digunakan meliputi;

- a) Skripsi
- b) Buku-Buku ilmiah di bidang hukum
- c) Jurnal ilmiah
- d) Artikel ilmiah.

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum
- b) Situs di internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang dikaji seperti ensiklopedia dan Wikipedia.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1) Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini, Peneliti mengawasi dan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Baru di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus: Wisata Ikan Larangan). Dalam sesi wawancara, penulis mewawancarai Pemerintah Desa setempat (Kepala Desa), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), serta Masyarakat Desa Taba Lubuk Puding dan pihak-pihak terkait yang dipandang berkompeten dalam bidangnya. Selain itu, penulis menggunakan beberapa media pendukung yaitu perekam suara, alat tulis, dan lain-lain.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan

mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹³ Dokumentasi memudahkan penulis dalam mencari teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Baru di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus: Wisata Ikan Larangan).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

¹³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184.

memperoleh suatu kesimpulan.¹⁴ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain;

a. Analisis Deskriptif Kualitatif

Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Ini membantu dalam memahami konteks dan makna dari data yang dikumpulkan.

b. Reduksi Data

Proses ini melibatkan pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan untuk memudahkan analisis. Ini penting untuk mengeliminasi informasi yang tidak perlu dan menekankan pada data yang mendukung tujuan penelitian.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau narasi. Penyajian yang baik membantu dalam menyampaikan temuan penelitian dengan jelas.

d. Penarikan Kesimpulan

¹⁴ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h. 9.

Setelah data dianalisis dan disajikan, penarikan kesimpulan dilakukan untuk merangkum temuan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Ini adalah langkah penting untuk menjawab pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. Bab ini mencakup Teori Kebijakan Publik, Teori Pembangunan Wisata, Teori Siyasa Tanfidziyah, Teori Stakeholder, dan Teori Partisipasi Masyarakat.

BAB III. Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata terhadap Pengembangan Wisata Baru di Desa Taba Lubuk

Puding Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

